

LSM DAN NEGARA (STUDI KOMPARATIF HUBUNGAN LSM DAN NEGARA ERA ORDE BARU DAN PASCA ORDE BARU DALAM MENGGAGAS PEMILU YANG DEMOKRATIS / PEMILU 1999)

Oleh : Dewi Erowati *

Abstract

The NGO (Non Governmental Organization) and the state, directly or indirectly will always be involved to do interactions in certain relation patterns. Social political growth and changes also bring impacts and effects to the relation pattern forms between them. The recent study was a study of comparative on the relation between the NGO and the state in New Order and Post the New Order. The NGO and state relation in New Order era can be unbalanced relation because the NGO always be follow state of the policy. The NGO and state relation Post the New Order era more reciprocally, in that showed from merger the NGO community to law reformation nationality concorsium (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional). Such that, the NGO movement more systemic and impact from the state policy.

Keywords: *The NGO, state*

A. PENDAHULUAN

Negara demokrasi merupakan pilihan yang paling baik yang banyak dianut oleh banyak negara pada saat ini. Salah satu indikator suatu negara dikatakan demokratis adalah melalui penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu merupakan sarana untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Dengan kata lain, baik buruknya kualitas demokrasi bisa dilihat dari bagaimana pemilu di suatu negara dapat terlaksana. Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 9 kali, sedangkan pemilu pada masa orde baru sebanyak 6 kali yaitu pada tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992 dan tahun 1997. Pemilu yang dilaksanakan setelah orde baru (pasca orde baru) sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004. Kualitas penyelenggaraan pemilu tercermin dari partisipasi masyarakat, perhitungan suara secara fair dan transparan, adanya lembaga pemilu yang independen, tidak adanya tekanan atau paksaan dari birokrat/siapapun untuk memilih kontestan tertentu.

Diskursus hubungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan negara sangat menarik untuk dikaji terlebih setelah tumbanganya era pemerintahan Soeharto, dimana peranan LSM sangat pesat dalam menumbuhkan kehidupan yang lebih demokratis. Dalam kaitan itulah, penulis berusaha membandingkan hubungan LSM dan negara pada masa orde baru dan pasca orde baru terutama dalam mengkaji mengenai pemilihan

umum, khususnya pemilihan umum tahun 1999. Untuk seterusnya pemilihan umum pada tulisan ini disingkat dengan pemilu.

B. PEMBAHASAN

B.1 Organisasi Non Pemerintah (Ornop)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dilihat dari perspektif sejarah, keberadaan LSM sudah lama ada yaitu sejak pertengahan abad ke-19 seperti yang dikembangkan oleh Alexis De Tocqueville (seorang politisi dan pemikir politik terkenal berkebangsaan Prancis) pada tahun 1831-1832 yang mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) untuk meneliti kehidupan politik di negara itu. Setelah kembali dari AS dalam laporan tertulisnya tentang kehidupan politik di AS (Democracy in America), Tocqueville mengemukakan bahwa dia sangat terkesan dengan keberadaan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar birokrasi pemerintahan yang jumlahnya cukup banyak dan bervariasi. (Adi Suryadi Culla, 1999: 93-97) Dalam tulisan tersebut, Alexis De Tocqueville menyebutkan ada 2 jenis organisasi, antara lain : organisasi keagamaan yang berpusat di gereja, organisasi masyarakat yang bersifat lokal dalam lingkungan bertetangga. Menurutnya, organisasi-organisasi itu dibentuk atas dasar suka antara sesama warga masyarakat atau organisasi yang bersifat sukarela (voluntary organization). Organisasi-organisasi tersebut menjalankan berbagai kegiatan dari dan untuk masyarakat yang dalam masyarakat lain

*) Staff Pengajar Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip-Undip

mungkin dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara, memobilisasi sumberdaya serta menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah atau negara.

Sementara menurut Ismid Hadad, secara sederhana yang dimaksudkan dengan LSM adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang merupakan lembaga-lembaga yang berada diluar organ pemerintah dan perusahaan bisnis swasta, yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi dan pengembangan swadaya masyarakat. Organisasi sosial ini tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara wajar dan akrab dengan berbagai kelompok masyarakat terutama mereka yang berada di lapisan sosial paling bawah dalam suatu masyarakat. Kemampuan tersebut didukung oleh para anggota yang memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok marginal sebab mereka pada umumnya adalah tenaga muda terdidik yang memiliki idealis yang tinggi sehingga mereka mampu melakukan pendekatan yang luwes dan kreatif sehingga dapat mendorong masyarakat untuk maju melalui metode yang bersifat partisipatif. Di samping itu, ukuran organisasi mereka sangat kecil dan tidak birokratis sehingga memungkinkan melakukan usaha pembinaan terhadap masyarakat secara intensif dengan cara-cara yang edukatif dan manusiawi.

Menurut Peter Hanam (1988:4), pengertian LSM ada dua yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, yang dimaksud dengan LSM adalah organisasi yang memiliki komitmen ideologi dan kapasitas kelembagaan untuk memberdayakan masyarakat terutama kelompok-kelompok marginal di dalam suatu masyarakat sebagai akibat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan secara khusus, yang dimaksud dengan LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat bawah (*grassroots*) dengan menciptakan dan mendukung kelompok-kelompok swadaya lokal.

Menurut MM Billah dan Abdul Hakim Garuda Nusantara (1988:17), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan cerminan kebangkitan kesadaran golongan menengah dari masyarakat Indonesia terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan, masalah HAM, dampak yang ditimbulkan oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan itu sendiri. Mansur Fakhri (2000:123) mengemukakan pendapatnya mengenai LSM adalah pelbagai organisasi yang

bukan bagian dari organisasi pemerintah serta didirikan bukan sebagai hasil persetujuan antar pemerintah. Sementara itu AS Hikam (dalam Adi Suryadi Culla, 1999: 122) bahwa LSM merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleharganya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menyimpulkan pengertian LSM ada dua yaitu, secara umum yang dimaksud dengan LSM adalah organisasi yang dibentuk oleh sejumlah orang yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan, secara khusus yang dimaksud dengan LSM adalah organisasi yang dibentuk oleh sejumlah orang yang memiliki kepedulian terhadap pelembagaan demokrasi, sehingga dalam melakukan aktivitasnya baik ditingkat lokal, regional, maupun nasional tidak menggantungkan pada pemerintah/negara dalam dukungan finansial, sarana dan prasarana serta lebih mengutamakan bantuan dari pihak donatur internasional.

B.2 Negara

Menurut Machfud MD (1989 : 67), bentuk-bentuk negara yang mungkin timbul adalah :

- (1) **Negara Pluralis** yaitu negara yang tidak mandiri, liberal dan hanya bertindak sebagai penyaring (*wasit*) dari berbagai kelompok kepentingan sehingga setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan bukanlah atas inisiatif negara. Dengan kata lain, kebijaksanaan negara disusun secara demokratis dan menarik partisipasi masyarakat secara penuh.
- (2) **Negara Marxis** yaitu negara yang tidak mandiri, tidak netral dan juga tidak demokratis. Semua kebijakan negara bukanlah atas inisiatif negara sendiri, tetapi inisiatif dari dan untuk kepentingan kelas yang berkuasa. Dengan demikian, negara tidak lain merupakan alat dari kelas yang berkuasa.
- (3) **Negara Organik** yaitu negara yang mandiri, otoriter meskipun secara teoritis dikatakan bahwa negara bertujuan menjamin kepentingan umum. Dalam negara organik semua kebijaksanaan negara dibuat atas inisiatif dan dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan negara.
- (4) **Negara Kooperatis** yaitu negara yang tidak mandiri tetapi secara formal masih aktif melakukan konsultasi dengan wakil-wakil

rakyat dalam pembuatan kebijaksanaan sehingga didalamnya masih ada unsur demokrasi. Hanya saja demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi yang datang dari atas dan bersifat terbatas. Hal itu disebabkan karena negara juga berperan aktif dalam menentukan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang berhak mengirimkan sejumlah wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat.

Hampir senada dengan pendapatnya Machfud MD, Arif Budiman (2002 : 17 - 21) membagi negara dalam tiga kategori yaitu pertama, Negara Organik, negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemauan sendiri yang mandiri, dan bukan sekedar alat dari keinginan sekelompok orang dimasyarakat, atau gabungan dari keinginan-keinginan kelompok yang ada di masyarakat. Negara memiliki misinya sendiri, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Atas dasar ini, negara bukan lagi merupakan lembaga yang pasif, menjadi alat dari kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, tetapi negara secara aktif mencampuri urusan masyarakat, untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Kedua, Negara Fasis, adalah sebuah negara totaliter, bukan sekedar otoriter, sehingga tidak dimungkinkan organisasi lain apapun tumbuh, kecuali organisasi yang dibentuk negara. Ketiga, Negara Marxis-Leninis, konsep negara sebagai diktatur proletariat, di mana negara juga memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksakan kehendaknya terhadap warganya.

Dalam ilmu politik, pengertian negara sangatlah abstrak, sehingga sulit untuk menggunakannya secara nyata. Oleh karena itu, dalam menelaah tentang negara paling tidak ada tiga yaitu: pertama, aspek rezim yaitu berupa aturan main (Rule of the Game) politik yang fundamental dalam masyarakat. Aturan main senantiasa didasarkan pada ideologi dan konstitusi. Kedua, aspek pemerintah, menunjuk pada lembaga-lembaga politik dan administratif formal yang membuat kebijakan dan mengambil keputusan-keputusan kolektif. Ketiga, aspek komunitas politik mencakup organisasi dan kesadaran politik yang lebih luas, level dimana nilai-nilai fundamental dalam masyarakat politik bercampur (berkoherensi) dengan tuntutan-tuntutan utama untuk beradaptasi terhadap lingkungan politik. Dalam tulisan ini, konsep negara dioperasionalkan/dijabarkan dengan aspek penelaahan pemerintah.

B.3 Hubungan LSM dan Negara

Hubungan antara negara dengan LSM sama sekali tidak dapat dipisahkan. Di negara manapun,

Pemerintah akan mengakui betapa besarnya peranan LSM dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh : di Filipina, pemerintah Fidel Ramos mengharapkan agar LSM memainkan peranan yang lebih besar dalam mensukseskan program pemerintah, begitu juga dengan di Thailand, kalangan LSM/NGO telah dimintai perannya untuk ikut merumuskan Rencana Pembangunan Nasional yang keenam (1986-1990) dan ketujuh (1991-1995), dimintai untuk menjadi anggota sejumlah badan pekerja, dan sub komisi untuk membahas sejumlah isu pembangunan. Hal yang sama terjadi pula di Malaysia. Di Jepang, kalangan LSM bahkan telah mendapat pengakuan dunia internasional karena kontribusi mereka dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan (Afan Gaffar, 2000: 206-207). Dalam mencermati hubungan LSM dan negara, James V Ryker (dalam Afan Gaffar, 2000: 208-212) mengungkapkan ada lima model yang pernah dipraktekkan di berbagai negara yaitu: pertama, autonomus. Dalam konteks hubungan yang seperti ini, pemerintah tidak menganggap LSM sebagai ancaman, karena itu membiarkan LSM bekerja secara independen atau mandiri. Kedua, facilitation/promotion. Pemerintah menganggap kegiatan LSM sebagai sesuatu yang bersifat komplementer, sehingga mendukung dengan menyediakan fasilitas dana, peraturan, dan hal-hal administratif yang lain. Ketiga, collaboration/cooperation, dimana Pemerintah menganggap bekerja sama dengan LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan, sehingga semua potensi dapat disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, cooptation/absorption, yaitu pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan kegiatan LSM dengan mengatur segala aktivitas mereka, serta melakukan kontrol secara aktif. Kelima, containment/sabotage/dissolution, pemerintah melihat LSM sebagai ancaman, dan membatasi ruang gerak mereka sehingga tidak jarang pemerintah membubarkan LSM yang diketahui melanggar ketentuan yang berlaku. Ia menyebutkan ada empat orientasi yang menentukan pola hubungan politik antara Ornop/LSM dengan Negara. Keempat hal tersebut adalah :

(1) Azas dan Ideologi.

Pemerintah berusaha mencari kecocokan dengan Ornop/LSM. Dalam tataran praktisnya akan terlihat sebagai orientasi isu yang diangkat oleh masing-masing pihak.

(2) Sumber dana

Sebagaimana kita ketahui, finansial merupakan aspek yang sangat menentukan pola hubungan LSM dengan Negara karena menyangkut kemandirian atau

- ketidaktergantungan pada keuangan negara.
- (3) Organisasi, termasuk di dalamnya sumber daya manusia.
 - (4) Partisipasi dalam menentukan kebijakan, atau sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam memberi masukan terhadap kebijakan negara.

Sementara itu, ada tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh berbagai LSM yaitu :

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat "grassroots", yang sangat

esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan (Afan Gaffar, 2000 : 203).

Untuk lebih jelasnya, Afan Gaffar meng gambarkannya dalam tabel berikut ini :

Tabel I.1
Dimensi Orientasi Dalam Pola Hubungan Antara Ornop/LSM dgn Negara-Pemerintah

Dimensi ruang politik	Strategi Ornop/LSM vis-a-vis Pemerintah Negara	Strategi Pemerintah/Negara vis-a-vis Ornop/LSM
Orientasi Isu	Mempengaruhi agenda pembangunan, mengkritik, dan mengajukan alternatif kebijaksanaan.	Menetapkan agenda dan prioritas pembangunan, memonitor alternatif apa yang dapat diterima
Finansial	Memobilisasi dukungan dana sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah	Membantu sumber keuangan, mengatur dan menyetujui penggunaannya untuk pembangunan
Organisasional	Menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan	Membantu proses administrasi LSM, mengatur kegiatan mereka dan pelaksanaan kegiatan di lapangan
Kebijaksanaan	Mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijaksanaan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijaksanaan	Membantu kebijaksanaan, dialog, mengatur akses ke pembuatan keputusan dan memelihara kontrol atas lingkungan pembuatan kebijaksanaan

Sumber: Afan Gaffar, "NGO/LSM, Ruang Publik dan Civil Society di Indonesia", dalam *Transisi Demokrasi di Indonesia*, hal 216.

Salah satu karakteristik khusus LSM dalam kaitannya dengan negara pemerintah adalah sikap kritis dan kecenderungan untuk tidak percaya serta senantiasa untuk bersikap hati-hati di dalam menjalin hubungan dengan pemerintah. Hubungan baik antara LSM dengan pemerintah akan terjadi apabila salah satu diantara keduanya membutuhkan. Jika LSM yang membutuhkan pemerintah, terutama dalam memberikan kelonggaran dalam melakukan aktivitasnya, maka LSM berusaha mengurangi perannya dalam hal mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, biasanya ada persyaratannya yaitu pemerintah tidak menghalangi kegiatan LSM. Sebaliknya jika pemerintah yang merasa membutuhkan LSM atau pemerintah senang bekerja sama dengan LSM apabila pemerintah merasa kebijakannya tidak ditentang oleh LSM dan apabila kegiatan LSM

sejalan dengan tujuan-tujuan dari pemerintah (John Clark, 1995 : 81 82).

Ketegangan antara pemerintah dan LSM bukanlah merupakan sesuatu yang aneh, baik di negara-negara (utara) maju maupun negara-negara berkembang (selatan), sebagaimana John Clark mengatakan bahwa ketegangan antara pemerintah dengan LSM di kawasan negara-negara selatan terjadi disebabkan oleh penggunaan teori yang berbeda dalam melihat dan menangani masalah masyarakat. Kalangan LSM yang terlalu menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta demokrasi akan dihadapkan pada pilihan berada di luar sistem kekuasaan atau menentang penguasa pada saat itu. Pemerintah pasti merasa khawatir terhadap Ornop/LSM yang jelas menentang penguasa, sehingga di satu sisi pemerintah memahami nilai ekonomis

bekerjasama dengan LSM, namun disisi yang lain pemerintah juga melihat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hambatan yang potensial yang harus dihadapi oleh negara-pemerintah dalam mensukseskan pembangunan.

Dalam perkembangan selanjutnya, kebanyakan LSM mulai merubah strateginya dalam menjalin hubungan dengan pemerintah. Jika selama ini kalangan LSM banyak menawarkan model pembangunan alternatif, maka sekarang berkecenderungan untuk mengembangkan dan mengajarkan analisis politik dan kebijaksanaan kepada masyarakat. Perubahan tersebut menurut John Clark bukanlah suatu kemunduran tetapi merupakan kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat. Penajaman analisis politik dan kebijaksanaan merupakan suatu kesadaran diri, terhadap sikap dan tindakan yang telah diambil oleh kalangan LSM dalam melihat bagaimana kebijaksanaan dirumuskan secara sengaja atau lebih mementingkan kepentingan negara. Model pendekatan pembangunan alternatif menurut John Clark (1995 : 92-105) yang menekankan pada aspek pendemokrasian lembaga dan partisipasi masyarakat kepada negara-pemerintah dalam skala nasional, kalangan LSM memiliki tiga pilihan yaitu:

1. Melakukan oposisi model pembangunan negara-pemerintah. Pada model ini, kalangan LSM mempergunakan segala saluran yang ada untuk merintangi setiap rencana atau kebijaksanaan yang diambil pemerintah yang merugikan kelompok-kelompok marginal (orang-orang miskin) dalam masyarakat. Dengan melakukan protes, menggunakan pengadilan untuk menentang keputusan-keputusan pemerintah, bersatu dengan kekuatan-kekuatan oposisi pemerintah atau gerakan massa seperti buruh dan mahasiswa untuk menggagalkan kebijaksanaan pemerintah, dll
2. Menyempurnakan model pembangunan negara-pemerintah. Berarti mengembangkan program sendiri, untuk mengisi celah-celah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok masyarakat marginal untuk memberikan pengaruh yang demokratis.
3. Melakukan perubahan terhadap model pembangunan negara-pemerintah. Model ini mensyaratkan agar kalangan LSM berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan pemerintah.

John Clark mengakui bahwa pendekatan-pendekatan diatas amat berbeda dalam gaya, namun semuanya pernah secara efektif dipraktekkan di negara-negara berkembang

(selatan). Pemerintahan yang buruk (otoriter, represif, dan sentralistik) sekalipun tetap mempunyai departemen yang "baik" tetap bisa bekerjasama dengan LSM.

B.4 Hubungan LSM dan Negara dalam Menggagas Pemilu Yang Demokratis

Pada masa Orde Baru, hubungan LSM dan Negara bisa dikatakan sebagai hubungan yang timpang karena pada saat itu, LSM mengikuti kemauan pemerintah dan bukan sebagai partner yang positif untuk kemajuan bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa orde baru bersifat otoriter, represif, dan sentralistik terhadap kegiatan-kegiatan sosial maupun politik, sehingga apabila ada LSM yang berani menentang terhadap kebijakan pemerintah orde baru dengan sendirinya akan mendapat perlawanan atau akan dimatikan organisasi tersebut. Negara menikmati otonominya berhadapan dengan LSM dan pada gilirannya bahkan senantiasa berupaya memaksakan kepentingan. Jaringan negara terutama lembaga-lembaga eksekutif telah berkembang menjadi alat efektif dalam mengelola dan menangani mobilisasi politik untuk mendukung kebijakan negara. Lebih dari itu, negara juga berhasil mengontrol LSM dengan berbagai kebijakan dan perundang-undangan serta proses pembentukan tatanan politik yang secara keseluruhan amat berdampak masif dengan dikhianatnya nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, hubungan LSM dengan Negara pada masa orde baru bisa dikatakan bersifat mengekor terhadap kebijakan pemerintah. Tidak ada LSM yang berani menggagas terbentuknya pemilu yang demokratis, juga asas pemilu walaupun langsung, umum, bebas dan rahasia tetapi dalam implementasinya sangat jauh dari yang diharapkan. Sekitar tahun 1996 terbentuk KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) tetapi KIPP ini juga tidak bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan pemilu. Banyak kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tahun 1997 yang tidak diungkapkan secara transparan oleh KIPP.

Pasca orde baru dengan tumbangnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan oleh gerakan reformasi pada tanggal 21 Mei 1998, tampuk kepresidenan diberikan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Hubungan LSM dengan Negara pada masa Pemerintahan Habibie lebih bersifat resiprositas (saling mempengaruhi satu sama lain), hal ini terlihat dari bergabungnya komunitas LSM ke dalam Konsorsium Reformasi Hukum Nasional atau biasa dikenal dengan KRHN. Dengan demikian, gerakan LSM lebih bersifat sistemik, dan hasilnya berpengaruh

terhadap kebijakan negara. Sebagai contoh yang merupakan hasil kerja komunitas LSM dalam KRHN dalam bidang politik menghasilkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dirumuskan sebagai asas pelaksanaan pemilu dalam draf RUU, karena pemilu menurut komunitas gerakan LSM harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu menurut komunitas LSM dalam KRHN harus pula mencerminkan prinsip yang terkandung dalam Piagam Hak Asasi Manusia Internasional, antara lain pertama, setiap orang berhak mengambil bagian dalam

pemerintahan secara langsung atau melalui wakilnya yang dipilih secara bebas, kedua, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah yang dinyatakan melalui pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dengan hak pilih yang sama serta pemungutan suara bersifat rahasia. Selain itu, ada satu hal yang sangat penting mengenai gerakan LSM pemilu yang menuntut agar terbentuk lembaga penyelenggaraan pemilu yang independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Atas jasa LSM itulah terbentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk lebih jelasnya pemikiran LSM yang diakomodir dalam UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu sebagai berikut:

Tabel I.2
Perbandingan Rancangan UU Pemilu Versi LSM, Negara Dan Pokok-pokok Pikiran Yang Diakomodir Dalam UU No.3 Tahun 1999 Tentang Pemilu

No.	Versi LSM (KRHN)	Versi Negara (Tim Tujuh Depdagri)	UU No.3 Tahun 1999 Tentang Pemilu
1	Pengertian Sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat	Pengertian Sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila	Pengertian Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945
2	Azas Langsung, umum, bebas dan rahasia	Azas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	Azas ,bahwa pemilu diselenggarakan secara demokratis dan ransparan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia
3	Sistem Proporsional dan distrik	Sistem Kombinasi sistem distrik dan proporsional Dalam satu distrik dapat dipilih lebih dari satu calon	Sistem Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional
4	Peserta Partai politik, utusan daerah dan golongan	Peserta Partai politik sesuai dengan UU tentang partai politik	Peserta Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat-syarat.
5	Penyelenggara - LPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki sifat i n d e p e n d e n - Terdiri dari wakil-wakil organisasi peserta pemilu (OPP) masing-masing sebanyak 1 orang dengan jumlah ganjil	Penyelenggara - LPU dibentuk oleh Presiden yang terdiri dari wakil pemerintah, wakil-wakil dari partai politik peserta pemilu (OPP) dan masyarakat - Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) s.d Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan oleh	Penyelenggara - Penyelenggara pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden.

	- Pemerintah sebagai fasilitator	- pemerintah bersama OPP dan masyarakat Panitia Pengawas terdiri dari unsur pemerintah, OPP, dan masyarakat	- Keanggotaan KPU terdiri dari 1 (satu) orang wakil dari masing-masing partai politik peserta pemilu dan 5 (lima) orang wakil pemerintah
6	<p>Pemungutan & Perhitungan Suara</p> <p>- Pemberian suara serentak Pemberian suara pada hari libur Pemberian suara dengan cara mencoblos Kegiatan pemungutan suara dan perhitungan disaksikan oleh wakil OPP dan masyarakat</p>	<p>Pemungutan & Perhitungan Suara</p> <p>- Pemungutan suara dilaksanakan dalam satu hari - Hari pemungutan suara pada hari libur/diliburkan - Pemberian suara dengan mencoblos tanda gambar organisasi peserta pemilu</p>	<p>Pemungutan & Perhitungan Suara</p> <p>- Pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD I dan DPRD II ditempat pemungutan suara, dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan RI pada tanggal yang ditetapkan oleh KPU. - Hari pemungutan suara pada hari libur atau hari yang diliburkan - Pemberian dan pemungutan suara dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh KPU</p>

Sumber: Lampiran Notulensi Konferensi Pers Konsorsium Reformasi Hukum Nasional mengenai Rancangan Perubahan terhadap UU tentang Pemilu, Hotel Indonesia, 25 Juni 1998 dan UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu

C. PENUTUP

Pada masa orde baru, di Indonesia sebagaimana negara-negara di dunia ketiga, dihadapkan pada kendala kegiatan negara yang begitu kuat mengontrol kehidupan publik. Akibatnya adalah lemahnya kekuatan LSM yang ditandai dengan ketergantungan LSM yang tinggi terhadap negara. Dengan demikian, LSM hanya mengikuti kebijakan pemerintah, tunduk kepadanya dan bukan bersifat resiprok. Begitu pula dalam menggagas pemilu yang demokratis, LSM pada masa orde baru tidak bisa mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemilu. Sedangkan LSM pada era pasca orde baru, negara senantiasa mengakomodir berbagai aspirasi dan gagasan yang disampaikan oleh komunitas LSM.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Budiman, Arief. 2002. Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Clark, John (terj). 1995. NGO Dan Pembangunan Demokrasi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
Culla, Adi Suryadi.1999. Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-cita Reformasi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Fakih, Mansour. 2000. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

b. Majalah

Billah, MM dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, "LSM di Indonesia, Perkembangan dan Prospeknya", Prisma No. 4 Tahun 1988

Hanam, Peter, " Pengembangan Bentuk Pembangunan Alternatif, Pengalaman LSM di Indonesia", Prisma No. 4 Tahun 1988